

JURNAL

**IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TERHADAP HAK KORBAN PERKOSAAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**(Studi di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan
Pengadilan Negeri Bangkalan)**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

R. RORO SISKA JUNIYANTI

NIM. 0910113161



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

JURNAL

**IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TERHADAP HAK KORBAN PERKOSAAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**(Studi di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan
Pengadilan Negeri Bangkalan)**

Oleh :

R. RORO SISKI JUNIYANTI

NIM. 0910113161

Disetujui pada tanggal: Maret 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR.BAMBANG SUDJITO, SH.,M.HUM.
NIP. 19520605 198003 1 006

DR.NURINI APRILINDA, SH., M.HUM.
NIP. 19760429 200212 2 001

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

ENY HARIYATI, SH., M.H.
NIP. 19590406 198601 2 001

ABSTRAKSI

R. RORO SISKI JUNIYANTI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan), Dr.Bambang Sudjito,S.H.,M.Hum., Dr.Nurini Aprilinda,SH.,M.Hum.

Di dalam penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rectstaat*). Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan terutama bagi mereka yang memperoleh kekerasan seksual. Banyaknya kasus perkosaan yang terjadi dimasyarakat yang sebagian besar korbannya adalah wanita yang banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan baik mental maupun penderitaan secara fisik. Penulis mengangkat tema ini dengan landasan bahwa implementasi Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kurang optimal terutama dalam melindungi hak korban perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan. Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini ialah mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana yaitu di wilayah hukum negeri Bangkalan dan mengetahui kendala yang dihadapi serta upaya penanggulangannya. Sehingga diharapkan penelitian dan penulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian empiris, karena akan melakukan kajian secara mendalam tentang tindak pidana perkosaan terutama implementasi Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 yang dilakukan oleh para penegak hukum di wilayah hukum Negeri Bangkalan. Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan pola penelitian atau sifat penelitian studi lapangan dan *personal survey*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh responden yang terkait yakni antara lain Wakil Panitera Negeri Bangkalan, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bangkalan, Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Bangkalan.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa di wilayah hukum Bangkalan hak korban yang telah diatur dalam UU nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban penerapannya kurang optimal karena masih banyak kendala – kendala yang dihadapi yakni seperti kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan perlindungan bagi korban perkosaan, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum yang ada di wilayah Bangkalan, tidak adanya tuntutan ganti rugi dari korban perkosaan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam berperan aktif melaporkan tindak pidana perkosaan. Adapun upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara ketiga instansi hukum yakni Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Pemerintah Pusat seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam memberikan pelayanan perlindungan bagi hak korban perkosaan.

Kata Kunci : Implementasi, Hak Korban Perkosaan, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

R. RORO SISKI JUNIYANTI, Criminal Law, Faculty of Law, University Brawijaya, March 2013, Implementation of Article 5 Paragraph (1) Act - Act No. 13 of 2006 on the Protection of the Rights of Witnesses and Victims of Rape Victims in the Criminal Justice System (Study in Police of Resort Bangkalan, Public attorney of Country of Bangkalan and District Court Of Bangkalan), Dr.Bambang Sudjito,S.H.,M.Hum., Dr.Nurini Aprilinda, S.H., M.Hum.

In the explanation of the 1945 Constitution affirmed that Indonesia is a country of laws (rectstaat). Judicial practice in Indonesia has not fully guarantee legal protection for women, especially for those who obtain sexual violence. The number of rapes that occur in the community that most of the victims are women who inflict harm and suffering, both mental and physical suffering. The authors take up this on the grounds that the implementation of article 5, paragraph 1 of Law Number 13 of 2006 on the protection of witnesses and victims are less than optimal, especially in protecting the rights of victims of rape in Police of Resort Bangkalan, Public attorney of Country of Bangkalan and District Court Of Bangkalan. The purpose of the author of the topic issue is to know and analyze the implementation of Article 5 Paragraph (1) of Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims in the criminal justice system that is in the law of the land Bangkalan and know the obstacles encountered and the mitigation efforts. It is expected that the research and writing can provide benefits both theoretically and practically.

Type of research by the author is empirical research, as it will do in-depth study on the crime of rape, especially the implementation of article 5, paragraph (1) of Law No. 13 of 2006 made by law enforcement in the jurisdiction of the State Bangkalan. Method approach will be used in legal research is Juridical Sociological Approach method, using a pattern or nature study and personal research field study survey. The population in this study are all related to the respondents including the State Bangkalan Deputy Registrar, Public Prosecutor at State Attorney Bangkalan, Chairman of the Protection of Women and Children (PPA) in the Police Resort Bangkalan.

The results of the research that has been conducted by the authors is that in the area of victims' rights law Bangkalan been regulated in Law Number 13 of 2006 on the protection of witnesses and victims are less than optimal implementation because there are still many obstacles - obstacles that faced such as lack of infrastructure and facilities to provide protection for victims of rape, lack of coordination among law enforcement agencies in the region Bangkalan, no claim for compensation of victims of rape, lack of awareness of the public to participate in an active role to report the crime of rape. The effort is to increase cooperation and coordination between the three agencies ie Police Resort Bangkalan law, Bangkalan State Attorney, and the District Court of the Central Government such Bangkalan Agency (Witness and Victim Protection Agency) to provide protection for the rights of rape victims.

Keywords: Implementation, Rape Victims Rights, Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Di dalam penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rectstaat*) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Dengan demikian khususnya pemerintah Indonesia sangat berperan aktif dalam melindungi Hak Asasi Manusia khususnya hak – hak korban tindak pidana yang dialami warga negaranya untuk mengakomodasi terwujudnya keharmonisan hubungan hak dan kewajiban warga negara yang kadang kala sering berbenturan satu sama lain.

Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan terutama bagi mereka yang memperoleh kekerasan seksual. Lembaga sistem peradilan di negara ini secara praktik di masyarakat dalam menjalankan tugasnya kurang memperhatikan perlindungan terhadap hak korban kejahatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam tahap penyidikan, hak korban terabaikan seperti korban diperiksa tanpa didampingi oleh tenaga medis, ditanya dengan mempergunakan kalimat – kalimat yang terkesan kurang sopan, dan sebagainya. Proses penuntutan juga demikian, Jaksa Penuntut Umum seringkali mengabaikan hak yang seharusnya diketahui dan diperoleh oleh korban sehingga masih banyaknya korban yang tidak mengetahui perkembangan kasus dan hak – hak yang telah diatur dalam Undang – Undang sehingga tidak adanya tuntutan dari pihak korban. Penderitaan korban perkosaan semakin bertambah ketika putusan hakim menjatuhkan sanksi ringan bagi pelaku tindak pidana perkosaan dengan tidak memperhatikan hak asasi perempuan.

Kasus perkosaan yang pernah terjadi di kabupaten Bangkalan dialami oleh seorang wanita yang tak lain adalah istri dari teman terdakwa. Saat kejadian korban sedang tertidur dan terdakwa menginap dan tidur di halaman teras rumah korban bersama suami korban. Namun, saat suami korban tidur terlelap terdakwa memasuki kamar tidur korban dan meniduri atau menyetubuhi korban dengan disertai tindak kekerasan dengan menempelkan senjata tajam jenis sangkur diperut korban sambil mengancam korban agar menuruti permintaannya. Dalam kasus ini

korban menderita fisik dengan luka robek pada vagina dalam hingga mengeluarkan darah segar dari lubang vagina.¹

Dalam proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan, baik pelaku kejahatan (*offender*) maupun korban kejahatan (*victim of crime*) menghendaki keadilan. Bagi pelaku kejahatan menghendaki perkaranya diperiksa secara adil dengan mengindahkan hak – haknya serta aturan main yang telah ditentukan, namun bagi korban kejahatan juga menghendaki agar pelaku kejahatan diadili dan kalau perlu dihukum seberat – beratnya, bahkan berharap adanya ganti rugi dari tersangka maupun pemerintah untuk memulihkan keadaan korban kembali baik seperti semula.

Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah “*barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara dua belas tahun*”. Sedangkan perlindungan hak Korban (*Victim Rights Protection*) dalam KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) hanya diatur di dalam 4 (empat) pasal yakni Pasal 98, 99, 100, 101 yang mengatur hak – hak korban yaitu hak ganti rugi, hak Restitusi yaitu hak yang diberi pelaku terhadap korban dan hak kompensasi yaitu hak yang diberikan pemerintah kepada korban. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lain serta di dalam Undang – Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak – hak tersangka dan atau terdakwa.

Untuk melindungi hak – hak yang dimiliki oleh korban, pemerintah membentuk peraturan baru yaitu Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana hak – haknya jelas diatur didalam Pasal 5 Ayat (1), yaitu :

- a. *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. *Memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. *Mendapat penerjemah;*
- e. *Bebas dari pernyataan yang menjerat;*
- f. *Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;*

¹Surat Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 126/Pid.B/2011/PN.Bkl.

- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. Mendapatkan identitas baru;*
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;*
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau;*
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.*

Pemerintah telah membentuk Peraturan Perundang – Undangan khusus untuk melindungi korban tindak pidana kejahatan, namun tidak sedikit korban yang memperoleh haknya dari adanya suatu kerugian yang diperoleh akibat terjadinya suatu tindak pidana yang dialaminya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan ?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan maupun Pengadilan Negeri Bangkalan dan bagaimana upaya mengimplementasikan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di wilayah hukum Negeri Bangkalan ?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, karena akan melakukan kajian secara mendalam tentang tindak pidana perkosaan terutama implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dilakukan oleh para penegak hukum di wilayah hukum Negeri Bangkalan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam upaya melakukan perlindungan khusus terhadap korban perkosaan.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan pola penelitian atau sifat penelitian studi lapangan dan *personal survey*. Aspek yang hendak diteliti ialah implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam prakteknya di Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam melakukan perlindungan terhadap korban terkait dengan kasus perkosaan.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Bangkalan yaitu seluruh instansi negara yang memiliki wewenang dalam menegakkan hukum antara lain Polres Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer : data yang diperoleh dari sumber pertama.²

Sumber data primer dalam penelitian ini mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak dan beberapa responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah pihak penegak hukum di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan yaitu antara lain di instansi Kepolisian yaitu Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Wakil Panitera Negeri Bangkalan.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI – Press, 2007, hlm 12

2. Data Sekunder : data yang mencakup dokumen – dokumen resmi, buku-buku, hasil – hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan seterusnya.³ Sumber data sekunder ini berupa peraturan – peraturan yaitu :

- Undang – Undang Dasar 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

E. Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan dari unit analisis atau hasil pengukuran yang dibatasi oleh kriteria tertentu.⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh responden yang terkait yakni antara lain Wakil Panitera Negeri Bangkalan, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bangkalan, Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Bangkalan.

Sample ialah sekelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sample.⁵ Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah sample purposive, yaitu Wakil Panitera yang pernah bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, dan surat – surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan serta salinan putusan pengadilan terkait kasus perkosaan, Jaksa Penuntut Umum yang pernah menangani tuntutan kasus perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan polisi yang pernah menyidik

³*Ibid*, hlm 73

⁴Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 72

⁵*Ibid*, hlm 124

kasus perkosaan di Bangkalan. Sedangkan responden merupakan pihak terkait yang dapat memberikan data atau informasi terkait hal yang dibutuhkan peneliti melalui wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang representatif antara lain:

1. 2 (dua) orang polisi sebagai penyidik di Kepolisian Resort Bangkalan yaitu Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Pembantu Pimpinan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. 3 (tiga) orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan yaitu Jaksa Muda sebagai Kepala Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Muda perlindungan anak, dan Jaksa Muda Wira sebagai petugas barang bukti.
3. 2 (dua) orang dari Pengadilan Negeri Bangkalan yaitu Wakil Panitera Negeri Bangkalan, Panitera muda Pidana di Pengadilan Negeri Bangkalan.

F. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan, yaitu:

- a. Data primer diperoleh melalui beberapa tahap, antara lain wawancara, dokumentasi, dan observasi.
- b. Data sekunder : dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu antara lain dengan membaca, menulis, dan menganalisis hasil wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis yakni setelah data terkumpul peneliti menganalisis hasil wawancara yang diperoleh langsung dari responden.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan di Wilayah Hukum Negeri Bangkalan

A.1 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan⁶

Tabel 1. Substansi Hukum Pasal 5 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan

No.	Hak Korban Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006	Keterangan
a.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	Terlaksana
b.	Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan	Terlaksana
c.	Memberikan keterangan tanpa tekanan	Terlaksana
d.	Mendapat penerjemah	Terlaksana
e.	Bebas dari pernyataan yang menjerat	Terlaksana
f.	Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus	Terlaksana
g.	Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan	Terlaksana
h.	Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan	Terlaksana
i.	Mendapatkan identitas baru	Tidak Terlaksana
j.	Mendapatkan tempat kediaman baru	Tidak Terlaksana
k.	Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Terlaksana
l.	Mendapatkan nasihat hukum	Terlaksana
m.	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir	Tidak Terlaksana

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

⁶Hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bangkalan, pada tanggal 12 Februari 2013

Anggota penyidik di Polres Bangkalan yakni penyidik di bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bekerjasama dengan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) untuk memberikan perlindungan utama berupa pendampingan kepada korban kejahatan terhadap keamanan pribadi korban.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, penyidik polisi dibagian PPA memberikan keringanan kepada korban sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat adanya suatu pelanggaran tindak pidana agar korban menentukan sendiri bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh korban.

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

Dalam memberikan keterangan kesaksiannya, korban yang merasa ketakutan di dalam ruang penyidik diberikan diperbolehkan didampingi oleh kerabat korban agar korban tidak merasa tertekan dengan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik terutama bagi korban yang dibawah umur.

- d. Mendapat penerjemah;

Korban tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan di Bangkalan yang tidak lancar berbahasa Indonesia, memperoleh bantuan penerjemah dari penyidik di Polres Bangkalan yang bekerjasama dengan PPT yang mendampingi korban dari awal proses penyidikan.

- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;

Dalam proses penyidikan, Polisi Bangkalan tidak mengajukan pernyataan berupa pertanyaan – pertanyaan yang dapat menjerat korban agar korban tidak merasa tertekan dan dapat memberikan informasi yang sebenar – benarnya kepada penyidik guna jalannya proses penyidikan.

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

Untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan kasus, penyidik menyerahkan kewenangan kepada anggota PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) sehingga nantinya PPT yang mendampingi korban dari proses awal dapat menyampaikan perkembangan kasus yang sedang berjalan kepada korban.

- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Korban dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan dari hasil sidang yang dapat disaksikan langsung oleh korban dan juga korban dapat memperoleh informasi dari Jaksa sebagai Penuntut Umum dan juga PPT yang mendampingi korban dari proses penyidikan.

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

Terkait dengan terpidana yang dibebaskan, berdasarkan proses hukum yang berlaku terpidana dibebaskan atas persetujuan dari pihak korban dan pihak keluarga, sehingga korban telah mengetahui terkait terpidana yang dibebaskan.

- i. Mendapatkan identitas baru;

Hak korban khusus bagi korban perkosaan untuk memperoleh identitas baru belum dapat diberikan karena perkara perkosaan yang ditangani Polres Bangkalan masih dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

Hak korban perkosaan untuk mendapatkan kediaman baru belum diberikan oleh penyidik di Polres Bangkalan, karena perkara perkosaan di Polres Bangkalan masih tergolong perkara perkosaan ringan dan tidak membutuhkan bantuan hukum, selain itu sarana dan prasarana dari pemerintah yang kurang memadai untuk memberikan kediaman baru bagi korban tindak pidana.

- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

Dalam proses penyidikan, korban akan dijemput langsung ke kediaman korban terutama untuk korban perkosaan yang secara tidak langsung penyidik telah meringankan beban yang harus ditanggung bagi korban dan memberikan hak korban. Dalam hal ini penyidik PPA di Polres Bangkalan yang menangani kasus perkosaan dibantu oleh PPT dalam mendampingi korban.

- l. Mendapatkan nasihat hukum;

Nasihat hukum yang diberikan oleh penyidik yang menangani kasus perkosaan di Polres Bangkalan merupakan anggota lembaga PPT yang dari awal telah ditunjuk penyidik untuk mendampingi korban hingga di Pengadilan agar mempermudah korban dalam memperoleh haknya.

- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Untuk hak korban dalam memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir selama ini belum diterapkan dan diberikan oleh polisi Bangkalan sebagai penyidik yang menangani kasus perkosaan.

A.2 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Saksi Dan Korban di Kejaksaan Negeri Bangkalan⁷

Tabel 2. Substansi Hukum Pasal 5 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan

No.	Hak Korban Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006	Keterangan
a.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	Terlaksana
b.	Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan	Terlaksana
c.	Memberikan keterangan tanpa tekanan	Terlaksana
d.	Mendapat penerjemah	Terlaksana
e.	Bebas dari pernyataan yang menjerat	Terlaksana
f.	Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus	Terlaksana
g.	Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan	Terlaksana
h.	Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan	Tidak Terlaksana
i.	Mendapatkan identitas baru	Tidak Terlaksana
j.	Mendapatkan tempat kediaman baru	Tidak Terlaksana
k.	Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Tidak Terlaksana
l.	Mendapatkan nasihat hukum	Tidak Terlaksana
m.	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir	Tidak Terlaksana

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

⁷Hasil wawancara dengan Jaksa Muda Bagian Perlindungan Anak di Kejaksaan Negeri Bangkalan, pada tanggal 25 Februari 2013

Lembaga Kejaksaan Negeri Bangkalan membina hubungan kerjasama dengan Kepolisian Bangkalan untuk memberikan perlindungan atas keamanan pribadi korban hingga di proses persidangan Kejaksaan bekerjasama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Bangkalan untuk melakukan pendampingan terhadap korban perkosaan di Pengadilan.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan

Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak korban perkosaan menyediakan bantuan hukum secara sukarela bagi korban kejahatan yang membutuhkan pendampingan dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya, namun jika korban memilih untuk meminta bantuan dari instansi atau lembaga lainnya maka lembaga tersebut harus diakui oleh hukum sehingga dapat bertanggungjawab dan membantu terlaksananya proses hukum bagi korban kejahatan.

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Jaksa sebagai Penuntut Umum akan mengajukan permohonan kepada hakim apabila korban merasa tertekan di muka sidang Pengadilan karena adanya kehadiran dari terdakwa maka terdakwa diperbolehkan meninggalkan ruang sidang demi lancarnya jalan persidangan. Hal ini menghindari korban mengalami trauma atas perkosaan yang dilakukan terdakwa kepada korban.

- d. Mendapat penerjemah

Bagi korban kejahatan yang tidak lancar berbahasa Indonesia, Kejaksaan bekerjasama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dari Kepolisian Resort Bangkalan untuk melakukan pendampingan terhadap korban dan bagi korban yang memiliki cacat mental pihak Kejaksaan bekerjasama dengan SLB (Sekolah Luar Biasa) agar memperoleh penerjemah.

- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat

Jaksa sebagai Penuntut Umum tidak memberikan pernyataan yang dapat membuat korban tidak memperoleh haknya melainkan membantu korban agar memperoleh keadilan dalam hal melindungi hak korban.

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus

Kejaksaan berupaya memberikan informasi kepada korban terkait dengan perkembangan kasus dan proses hukum yang sedang berjalan jika ada korban kejahatan yang memiliki inisiatif menanyakan sendiri mengenai perkembangan kasusnya kepada pihak Kejaksaan.

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Dalam hal membagi informasi mengenai putusan Pengadilan kepada pihak korban, Kejaksaan bekerjasama dengan pihak Kepolisian yang diwakili oleh PPT yang selalu memantau perkembangan kasus dan mendampingi korban.

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan

Selama ini di Kejaksaan Negeri Bangkalan tidak terdapat kasus mengenai terpidana dibebaskan dari tuntutan dan semua perkara dapat dibuktikan bahwa terpidana bersalah.

i. Mendapatkan identitas baru

Kejaksaan Negeri Bangkalan belum pernah memberikan identitas baru terhadap semua perkara tindak pidana yang di proses di Kejaksaan Negeri Bangkalan terutama untuk kasus perkosaan karena selama ini kasus perkosaan yang terjadi masih merupakan kasus perkosaan ringan yang korbannya dapat dilindungi oleh hukum dari adanya ancaman dari pihak terdakwa.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru

Kejaksaan Negeri Bangkalan juga belum pernah memberikan tempat kead战略an baru kepada korban perkosaan untuk melindungi haknya karena dalam kasus perkosaan korban lebih banyak memperoleh kerugian secara fisik bukan kerugian secara materiil.

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

Kejaksaan Negeri Bangkalan tidak memberikan secara langsung dalam mengganti biaya transportasi kepada korban karena selain tidak adanya tuntutan yang diajukan korban untuk memperoleh ganti rugi biaya transportasi sesuai kebutuhan korban.

l. Mendapatkan nasihat hukum

Pihak Kejaksaan yakni Jaksa sebagai Penuntut Umum bukan merupakan sebagai penasehat hukum bagi korban namun Penuntut Umum berupaya

melindungi hak korban melalui tuntutan di Pengadilan agar pelaku kejahatan dapat dipidana.

- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Kejaksaan Negeri Bangkalan belum pernah memberikan bantuan biaya hidup sementara bagi korban perkosaan karena untuk memperoleh biaya hidup sementara hanya diberikan bagi tindak pidana tertentu yang banyak merugikan korban dalam segi materiil.

4.1.3 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Saksi Dan Korban di Pengadilan Negeri Bangkalan⁸

Tabel 3. Substansi Hukum Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 terhadap hak korban perkosaan di Pengadilan Negeri Bangkalan

No .	Hak Korban Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006	Keterangan
a.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	Terlaksana
b.	Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan	Terlaksana
c.	Memberikan keterangan tanpa tekanan	Terlaksana
d.	Mendapat penerjemah	Terlaksana
e.	Bebas dari pernyataan yang menjerat	Terlaksana
f.	Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus	Tidak Terlaksana
g.	Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan	Terlaksana
h.	Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan	Terlaksana
i.	Mendapatkan identitas baru	Tidak Terlaksana
j.	Mendapatkan tempat kediaman baru	Tidak Terlaksana
k.	Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Tidak Terlaksana
l.	Mendapatkan nasihat hukum	Tidak Terlaksana
m.	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir	Tidak Terlaksana

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

⁸ Hasil wawancara dengan Wasis Soeharto selaku Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 2013

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Dalam proses di Pengadilan, upaya hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam melindungi hak korban dari keamanan yang berkenaan dengan kesaksian korban sebagai saksi di pengadilan adalah pihak pengadilan di pengadilan negeri Bangkalan merahasiakan identitas korban sebagai salah satu saksi di persidangan untuk melindungi korban atas keamanan pribadi, keluarga, maupun harta bendanya sehingga bebas dari ancaman dari pihak manapun terutama pihak dari terdakwa yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan oleh korban.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan

Korban kejahatan sebagai saksi di Pengadilan yang melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri terutama untuk kasus perkosaan, hakim memberikan keringanan untuk korban dalam menentukan sendiri bentuk perlindungannya terkait dengan teror dan intimidasi, korban sebagai saksi dapat mengajukan permohonan kepada pihak Kepolisian untuk segera memberikan perlindungan keamanan pribadi apabila korban merasa berada dalam kondisi keamanan yang sangat membahayakan dirinya demi lancarnya proses hukum di persidangan.

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Dalam hal memberikan kesaksiannya di pengadilan korban tindak pidana perkosaan yang masih merasa kondisi fisiknya belum stabil karena diakibatkan oleh trauma atas kejadian yang diterimanya, maka apabila dalam proses persidangan berlangsung terdakwa diperbolehkan tidak menghadiri ruang sidang untuk menghindari rasa takut dari korban yang dimintai kesaksiannya di pengadilan karena kehadiran dari pelaku kejahatan dapat mempengaruhi mental korban dalam memberikan kesaksiannya di muka pengadilan, sehingga korban dapat memperoleh haknya untuk memberikan kesaksiannya tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu, bagi perkara kesusilaan persidangannya bersifat tertutup yakni sesuai dengan Pasal 153 Ayat (3) KUHP untuk mengurangi beban mental korban perkosaan dalam menghadapi proses hukum di persidangan.

d. Mendapat penerjemah;

Korban sebagai saksi yang tidak dapat lancar berbahasa Indonesia dengan baik dalam memberikan kesaksiannya di persidangan, Hakim akan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh korban demi lancarnya proses persidangan.

e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;

Korban yang bersedia memberikan kesaksiannya di persidangan tidak mendapatkan pernyataan yang dapat menjerat korban dari pihak manapun sehingga korban diharapkan dapat memberikan informasi dan bukti yang nyata dan benar sesuai dengan kejadian yang dihadapinya saat pelaku memperkosa korban.

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

Korban yang membutuhkan informasi mengenai perkembangan kasus yang dihadapinya dapat mengetahui langsung dari persidangan dan juga Jaksa sebagai penuntut umum dapat menyampaikan perkembangan kasus kepada korban. Karena pengadilan hanya bertugas memutus dan mengadil perkara bagi pelaku kejahatan.

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Korban untuk memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan, diharapkan hadir dalam persidangan untuk menyaksikan secara langsung bentuk putusan hakim mengenai perkara yang dihadapinya.

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

Terpidana yang dibebaskan di pengadilan disampaikan melalui putusan hakim didalam persidangan sehingga korban dapat mengetahui langsung mengenai putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaannya. Selain itu, korban juga dapat memperoleh informasi tersebut dari penasehat hukumnya.

i. Mendapatkan identitas baru;

Pengadilan Negeri Bangkalan selama ini belum pernah memberikan identitas baru terhadap korban – korban tindak pidana khususnya bagi korban tindak pidana perkosaan yang masih tergolong dalam tindak pidana ringan.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

Korban perkosaan yang kasusnya disidang dan diputus di Pengadilan Negeri Bangkalan selama ini juga tidak pernah mengajukan penuntutan atas putusan hakim di Pengadilan untuk mendapatkan haknya berupa tempat kediaman baru sebagai rumah aman untuk jangka waktu tertentu karena selain faktor dari sarana dan prasarana dari pemerintah yang kurang memadai, korban juga tidak mengetahui haknya dari Jaksa Penuntut Umum.

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

Dalam putusan hakim di persidangan, hakim tidak membacakan hak korban untuk memperoleh biaya ganti kerugian baik dari pelaku kejahatan atau terdakwa maupun dari pemerintah karena tidak adanya tuntutan dari korban yang mengajukan permohonan ganti kerugian termasuk juga biaya transportasi korban sehingga hak korban kerap kali terabaikan.

l. Mendapatkan nasihat hukum;

Mengenai korban berhak mendapat nasihat hukum tidak diatur didalam KUHAP yang menyatakan bahwa korban berhak didampingi oleh penasehat hukum, namun korban boleh didampingi oleh misalnya WCC (*Woman Crisis Center*) yakni sebagai lembaga perlindungan perempuan seperti PPT dan PPA yang diwakilkan oleh salah satu anggota perempuan di lembaga tersebut maka hanya dipandang sebagai pengunjung sidang saja.

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak korban yang sering terabaikan dalam putusan hakim di pengadilan adalah hakim dalam membacakan putusan kasus tindak pidana di persidangan tidak membacakan biaya ganti kerugian yang harus dibayar oleh terdakwa maupun dari pemerintah kepada korban tindak pidana yang seharusnya diperoleh oleh korban. Sehingga korban tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh bantuan hidup sementara selama waktu perlindungannya.

B. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana dan upaya penanggulangannya

B.1 Kendala Kepolisian Resort Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak korban perkosaan dan Upaya Penanggulangannya

No.	Bentuk Kendala	Kendala Yang Dihadapi	Upaya Penanggulangan
1.	Internal	sarana dan prasarana dari pemerintah kurang memadai	Kepolisian Resort Bangkalan bekerjasama dan meminta bantuan kepada pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan fasilitas sarana dan prasarana kepada masyarakat terutama pelayanan kesehatan kepada korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di daerah Bangkalan
2.	Eksternal	a. Tidak adanya laporan dari masyarakat terutama korban Perkosaan b. Tidak adanya saksi dalam kejadian c. Sulitnya menemukan barang bukti dari korban dan saksi tindak pidana perkosaan d. Sulitnya masyarakat dimintai keterangan sebagai saksi	Penyidik di Kepolisian Resort Bangkalan bekerjasama dengan PPT untuk mendatangi secara langsung korban perkosaan sehingga korban bersedia melaporkan kasusnya ke kepolisian dan bersedia untuk diselesaikan melalui jalur hukum Berkaitan dengan mengumpulkan saksi dan barang bukti, Kepolisian Resort Bangkalan bekerjasama dengan lembaga Unit PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) yang diwakilkan oleh anggota perempuan dari PPT untuk mendampingi korban perkosaan dalam menyelesaikan proses hukum, dan nantinya PPT akan turun langsung mendatangi korban perkosaan untuk menawarkan pendampingan kepada korban sehingga diharapkan korban memperoleh keamanan dalam proses penyidikan dan dapat mempermudah penyidik menemukan saksi di kejadian.

B.2 Kendala Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak korban perkosaan dan Upaya Penanggulangannya

No.	Bentuk Kendala	Kendala Yang Dihadapi	Upaya Penanggulangan
1.	Internal	a. Kerjasama dan koordinasi internal antara Kejaksaan Negeri Bangkalan dengan instansi terkait yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan yang kurang sistematis	Memperbaiki kinerja Kejaksaan Negeri Bangkalan dan membangun kerjasama yang optimal dengan instansi penegak hukum lainnya di wilayah Bangkalan serta membantu Kepolisian dalam memberikan bantuan hukum dalam menentukan tindak pidana yang dapat didakwakan terhadap pelaku kejahatan
		b. Kurangnya bantuan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Pusat	Mengajukan bantuan hukum kepada LPSK untuk membantu memberikan perlindungan hukum secara optimal bagi korban tindak pidana di daerah – daerah khususnya wilayah hukum Negeri Bangkalan sesuai dengan hak korban yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2.	Eksternal	Tidak adanya upaya tuntutan dari korban untuk menuntut ganti rugi	Melakukan kerjasama dengan penyidik di Polres Bangkalan untuk memberikan prosedur upaya tuntutan ganti rugi kepada korban perkosaan.

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

B.3 Kendala Pengadilan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak korban perkosaan dan Upaya Penanggulangannya

No.	Bentuk Kendala	Kendala Yang Dihadapi	Upaya Penanggulangan
1.	Internal	Kurangnya koordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam melakukan upaya penuntutan di Pengadilan	Hakim melakukan koordinasi dengan Jaksa di Pengadilan dengan memberikan batas waktu bagi Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk mengajukan rencana tuntutan yang akan diajukan karena putusan tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya rencana tuntutan dari Penuntut Umum
2.	Eksternal	Saksi tidak hadir dalam persidangan	Hakim memberikan himbauan kepada penuntut umum agar segera menghadirkan saksi di persidangan, apabila dalam panggilan ketiga kalinya saksi tetap mangkir dari panggilan pengadilan akan dilakukan upaya paksa karena pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa di sidang pengadilan

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 5 Ayat (1) belum diberikan secara optimal oleh ketiga lembaga penegak hukum di wilayah Bangkalan yakni Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan terutama bagi korban perkosaan karena masih banyak ditemui kendala – kendala dalam memberikan perlindungan bagi hak korban perkosaan.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 antara lain sarana dan prasarana dari pemerintah kurang memadai, tidak adanya laporan dari masyarakat terutama korban Perkosaan, Tidak adanya saksi dalam kejadian, sulitnya menemukan barang bukti dari korban dan saksi tindak pidana perkosaan, dan sulitnya masyarakat dimintai keterangan sebagai saksi
3. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 antara lain Kerjasama dan koordinasi internal antara Kejaksaan Negeri Bangkalan dengan instansi terkait yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan yang kurang sistematis, Kurangnya bantuan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Pusat, Tidak adanya upaya tuntutan dari korban untuk menuntut ganti rugi.
4. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 antara lain Kurangnya koordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam melakukan upaya penuntutan di Pengadilan dan Saksi tidak hadir dalam persidangan.

SARAN

1. Aparat penegak hukum di wilayah Bangkalan yakni Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih memperhatikan hak korban yang terabaikan dan melakukan upaya koordinasi antar lembaga penegak hukum lainnya untuk memberikan hak korban secara optimal agar korban tindak

pidana khususnya korban perkosaan memperoleh keadilan dalam menyelesaikan proses hukum.

2. Aparat penegak hukum di wilayah Negeri Bangkalan lebih memperhatikan upaya ganti rugi yang seharusnya diperoleh oleh korban perkosaan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan juga korban perkosaan memperoleh rehabilitasi penyembuhan jiwa dan mental bagi korban serta diperlukan sosialisasi kepada korban tindak pidana agar korban mengetahui dan memperoleh haknya.
3. Struktur Organisasi bagi Perlindungan Perempuan di Kejaksaan Negeri Bangkalan lebih diperhatikan lagi sehingga melengkapi struktur organisasi perlindungan anak yang telah ada di Kejaksaan Negeri Bangkalan sehingga upaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia di wilayah Bangkalan khususnya bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana dapat memperoleh penuh hak – haknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan**, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Ansori**, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang
- Arif Gosita**, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional**, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Guntur Setiawan**, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.M.A. Kuffal**, 2002, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- I.S. Susanto**, 1995, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Lilik Mulyadi**, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi**, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Jakarta
- Made Sadhi Astuti**, 2003, *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, Penerbit Universitas Negeri Malang
- Mardjono Reksodiputro**, 1994 , *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta
- Nurdin Usman**, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Yuridika, Surabaya,
- Romli Atmasasmita**, 1991-1992, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, B.P.H.N Departemen Kehakiman, Mandar Maju, Jakarta.
- R.Sugandi**, 1980, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

- Sadjijono**, 2006, *HUKUM KEPOLISIAN : Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat**, 2002, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto**, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI – Press.
- Sulohan Yasyin**, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*.
- Surat Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan** Nomor : 126/Pid.B/2011/PN.Bkl
- Theo Van Bovem**, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta.
- Wirdjono Prodjodikoro**, 1980, *Tindak – Tindak Hukum Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- W.J.S. Purwodarminto**, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

INTERNET :

Kejaksaan Republic Indonesia, 2009, Pengertian Kejaksaan (Online), Kejaksaan Republik Indonesia, [Http://www.Kejaksaan.Go.Id/Tentang_Kejaksaan.Php?Id=1](http://www.Kejaksaan.Go.Id/Tentang_Kejaksaan.Php?Id=1)

<http://www.kompas.com>

<http://www.members.tripod.com>

<http://www.konseling.net>